

## **SULAWESI TENGGARA RAMPUNGKAN 200 KILOMETER JALAN PAKAI DANA HAMPIR RP200 MILIAR PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH FASE PERTAMA**



Sumber gambar: [sultra.tribunnews.com](http://sultra.tribunnews.com)

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara telah dirampungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra, Harmunadin mengatakan ada sepanjang 200 kilometer jalan yang diperbaiki melalui PHJD tersebut.

Jalan tersebut tersebar di beberapa daerah di Sultra, diperbaiki secara bertahap mulai 2019-2021 dan telah tuntas di tahun 2023. Dengan rincian, pada tahun anggaran 2019 Provinsi Sultra mendapat alokasi dana PJHD sebesar Rp76 miliar. "Itu untuk perbaikan jalan di Wakatobi, Buton, Buton Selatan dan Muna Barat," ujar Harmunadin, Jumat (7/7/2023).

Kemudian pada tahun anggaran 2020, Sultra mendapatkan alokasi dana sebesar Rp83 miliar. Diperuntukkan untuk melanjutkan perbaikan jalan di daerah yang sama, dengan tambahan Kota Kendari. Serta di tahun terakhir pada anggaran 2021, Pemprov Sultra mendapatkan alokasi dana sebesar Rp40 miliar untuk perbaikan jalan di Kota Kendari dan Kabupaten Buton.

Harmunadin menjelaskan Sultra masuk dalam fase pertama PHJD yang dicanangkan dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Program ini merupakan strategi pembinaan tata kelola jalan daerah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Secara khusus, program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas belanja infrastruktur jalan daerah.

Serta pengembangan wilayah termasuk di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kata dia, Sultra masuk dalam PHJD di fase pertama karena memiliki destinasi wisata strategis yakni Wakatobi.

Selain Wakatobi, Sultra, ada tiga provinsi yang juga masuk dalam fase pertama PHJD tersebut. Di antaranya Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.

"Program ini diperuntukkan bagi daerah yang memiliki atau masuk dalam 10 destinasi wisata nasional. Pada fase pertama Sultra masuk dalam salah satu program ini," ujarnya. "Penilaian dari Kementerian Keuangan, sangat ketat, untuk Provinsi Sultra selalu mendapatkan kriteria terbaik, baik dari segi pelaksanaannya maupun penyerapan anggarannya," jelasnya menambahkan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2023/07/07/sultra-rampungkan-200-km-jalan-pakai-dana-hampir-rp200-m-program-hibah-jalan-daerah-fase-pertama>
2. <https://detiksultra.com/kendari/dukung-pariwisata-pemprov-sultra-rampungkan-200-kilometer-program-jalan-hibah-provinsi/>
3. <https://zonasultra.id/bina-marga-sultra-berhasil-tuntaskan-phjd-200-km-untuk-tunjang-pariwisata.html>

#### **Catatan:**

1. Pada APBN TA 2019 mengalokasikan dana hibah dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp500 miliar untuk PHJD. Pemerintah daerah akan membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik melalui penguatan perencanaan, forum lalu lintas angkutan jalan, keterlibatan masyarakat dan gender. Setelah itu dana hibah dibayarkan ke pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM).
2. PHJD dengan APBN TA 2019 dilakukan untuk mendukung pengembangan KSPN di empat provinsi yaitu Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. PHJD direncanakan berlangsung selama lima tahun dari 2019 sampai 2023,
3. Mekanisme pencairan dana hibah yakni Pemerintah Daerah membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik (seperti penguatan perencanaan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, keterlibatan masyarakat dan gender) kemudian dana hibah dibayarkan ke pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM).
4. Program ini bertujuan untuk:
  - 1) Meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN);
  - 2) Meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN;
  - 3) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (value for money) untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan.